

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PRA BENCANA BANJIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KECAMATAN
BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS**

Toga Ariansyah Siregar^{1(a)}, Simson Ginting^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
^{a)}togaariansyah@students.usu.ac.id, ^{b)}simson.sinisuka@gmail.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

22-02-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

Kata Kunci:

Efektivitas, Kebijakan,
Penanggulangan, Pra Bencana
Banjir

Keywords:

Effectiveness, Policy,
Countermeasures, Pre-Flood
Disaster

Corresponding Author:

togaariansyah@students.usu.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.618>

ABSTRAK

Efektivitas kebijakan adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Richard Steers, meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan program kerja yang telah dibuat pemerintah maupun BPBD sendiri, serta untuk mengetahui tindakan apa saja yang selanjutnya diperlukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi iklim alam yang rawan bencana dan kurangnya akan sadar bencana masyarakat di Daerah Aliran Sungai, penebangan pohon sembarangan/penyempitan daerah aliran sungai yang dilakukan masyarakat di hulu sungai.

ABSTRACT

Policy effectiveness is a measure of whether or not the achievement of the goals of an organization achieves its goals. If an organization achieves its goals, it has run effectively. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is carried out by interview, observation, and documentation techniques. The data obtained were analyzed qualitatively with the approach to the theory of effectiveness proposed by Richard Steers, including goal achievement, integration and adaptation. This study aims to determine the effectiveness of policies and work programs that have been made by the government and BPBD itself, as well as to find out what actions are needed by the government in efforts to overcome flood disasters in Batang Lubu Sutam District, Padang Lawas Regency. The results of the study show that there is still a low understanding of the community and government officials in responding to natural climate conditions that are prone to disasters and lack of awareness of community disasters in watersheds, indiscriminate tree felling/narrowing of watersheds carried out by communities in the upper reaches of the river.

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang mempunyai kondisi geologis, demografis, hidrologis, geografis, dan sosiologis yang menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007).

Upaya menanggulangi bencana meliputi 3 tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan saat pasca bencana. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pada Tahap Pencegahan, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*) atau sering disebut juga Rencana Kesiapan (*Disaster Preparedness Plan*). Rencana ini adalah rencana Penanggulangan Bencana yang menyeluruh dari pra bencana sampai pasca bencana, akan tetapi terbatas pada apa kegiatan yang akan dilaksanakan, dan siapa pelakunya serta sumber dana yang akan dipakai. Contoh tindakan pencegahan yaitu melarang atau menghentikan penebangan hutan (Prabencana).

Tahap prabencana merupakan tahapan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana secara maksimal. Dengan rencana yang matang, diharapkan akan dapat meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana. kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana sebaiknya dilakukan sedini mungkin dan dipersiapkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga proses eksekusi kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada situasi tidak terjadi bencana, sebaiknya dapat melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan sebaiknya dapat melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan sebaik-baiknya. Hal yang penting untuk dipersiapkan pada situasi ini adalah mengenali seberapa besar tingkat kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sehingga dapat

diambil langkah *preventif* serta persiapan yang dapat dilakukan. Prabencana yang meliputi usaha-usaha pencegahan dan mitigasi, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan.

Salah satu bencana yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar yang mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir. Bencana banjir dapat dipengaruhi seperti curah hujan yang tidak bisa diprediksi serta adanya ulah tangan dari manusia seperti membangun pemukiman di daerah resapan, di daerah bantaran sungai, penggundulan hutan dan membuang sampah sembarangan.

Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan resapan air karena fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kejadian bencana banjir sangat bersifat lokal, artinya satu daerah bisa terlanda banjir dan daerah lainnya aman. Oleh sebab itu, informasi mengenai banjir yang resmi biasanya berasal dari institusi di daerah yang bertanggung jawab seperti BPBD.

Mengingat Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana dan kondisi kesiapsiagaan masih tergolong rendah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data bencana alam di Indonesia sebanyak 3.092 kejadian. Ini berarti setiap harinya terjadi sekitar 6 kali bencana alam di Indonesia. Berdasarkan jenisnya, bencana banjir mendominasi sekitar 42 persen dari total seluruh kejadian bencana selama 2021. Selain banjir, terdapat cuaca ekstrem (804 kejadian), bencana longsor (632 kejadian), dan kebakaran hutan (265 kejadian). Sementara bencana lainnya seperti gempa bumi yang terjadi sepanjang 2021 tercatat sebanyak 32 kali, lalu gelombang pasang/abrasi sebanyak 45 kali dan erupsi gunung sebanyak 1 kali/maka upaya untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan harus diberikan sejak dini. Sesuai dengan Penanggulangan Bencana, anak-anak dikelompokkan dalam kategori rentan. Prioritas pengurangan risiko bencana perlu diimplementasikan ke dalam sektor pendidikan dengan tujuan untuk mewujudkan generasi tangguh bencana. Peningkatan pemahaman mengenai kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dapat mengedukasi

dengan tujuan dapat mengurangi risiko terjadi bencana di suatu wilayah.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan dini, dan 3) Mitigasi bencana. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2016, Penanggulangan bencana merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tahapan Pra bencana adalah sebagai berikut:

1) Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Hal ini bertujuan agar warga mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana. Pemerintah melalui BNPB atau BPBD dapat menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. BNPB dan BPBD dapat membangun sistem manajemen logistik dan peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana. Permasalahan dalam kesiapsiagaan adalah peta rawan bencana bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Ditingkat masyarakat hasil pengkajian tersebut diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan usaha pengurangan risiko bencana. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan penanggulangan bencana banjir pada tahap kesiapsiagaan perlu dilakukan pemantauan daerah rawan bencana dan penyediaan peta rawan bencana agar mengetahui dan menginformasikan daerah rawan bencana

banjir kepada masyarakat sehingga dapat dicegah dengan baik.

- 2) Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini memiliki definisi sebagai serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 3) Mitigasi atau pengurangan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik. Permasalahan dalam mitigasi Menanggulangi bencana tidak dapat dilaksanakan secara mendadak melainkan butuh persiapan yang harus dilaksanakan jauh sebelum bencana itu datang melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan khusus. Salah satu persiapan yang dapat dilaksanakan sebelum bencana itu datang adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik yakni salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki

Wilayah Kabupaten Padang Lawas memiliki iklim yang hampir sama dengan sebagian besar Kabupaten/kota di Indonesia yaitu iklim hujan tropis. Tinggi rendahnya suhu di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Kondisi iklim ditandai dengan adanya musim penghujan, kemarau dan pancaroba. Penjelasan mengenai berbagai data yang berkaitan dengan curah hujan dan wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) dapat dilihat datanya pada website [inewstapanuli](https://www.inewstapanuli.com/Banjir-Bandan-Batang-Lubu-Sutam-Palas-Disebabkan-Karena/) yaitu *https://www.inewstapanuli.com/Banjir-Bandan-Batang-Lubu-Sutam-Palas-Disebabkan-Karena/*, yang diakses Pada Tanggal 12 April 2022, bahwa curah hujan terbanyak di Kabupaten Padang Lawas terjadi pada bulan April sebesar 192,8 mm dan terendah pada bulan Juni sebesar 19,8 mm.

Berdasarkan observasi peneliti dengan masyarakat, peneliti menemukan permasalahan di lapangan yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam

menyikapi kondisi iklim alam yang rawan bencana dan kurangnya akan sadar bencana masyarakat di Daerah Aliran Sungai, penebangan pohon sembarangan/ penyempitan daerah aliran sungai yang dilakukan masyarakat di hulu sungai. Karena dampak bencana banjir merupakan masalah klasik yang terus timbul dan menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan fasilitas umum, hingga mengakibatkan korban jiwa. Sehingga Penyebab banjir Kabupaten Padang Lawas adalah terjadinya penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penebangan hutan sembarangan yang dilakukan masyarakat di hulu sungai.

Peneliti juga melihat bahwasannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah kurang melakukan penanggulangan bencana banjir khususnya dalam pra bencana banjir. Pada kenyataannya yang dilihat oleh peneliti bahwasannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah setempat belum melakukan yang namanya itu penanggulangan bencana baik itu pencegahan, mitigasi dan peringatan dini. Karena dalam melakukan sesuatu perlu adanya yang namanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu penanggulangan bencana khususnya bencana banjir. Dimana tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengetahui tentang dampak dari bencana banjir, faktor-faktor penyebab banjir, pencegahan, dan bagaimana penanggulangan pra bencana banjir. Tetapi sebaliknya yang terjadi bahwasannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sama sekali (pra bencana banjir) tetapi setelah adanya banjir tersebut Badan BPBD melakukan sosialisasi. Dalam hal pencegahan ataupun mitigasi sangat penting dilakukan agar mengurangi dampak dari bencana tersebut tetapi peneliti melihat bahwasannya mitigasi dalam pra bencana banjir tidak ada tetapi setelah adanya bencana banjir tersebut dibuat mitigasi yaitu pembangunan Bronjong di Desa Tamiang.

Permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini, yaitu kurangnya sosialisasi dan tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2016 dengan semestinya tentang Penanggulangan Pra Bencana banjir yaitu pencegahan, mitigasi dan peringatan dini (kesiapsiagaan). BPBD Kabupaten Padang Lawas belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang

Penanggulangan Pra Bencana Banjir Khususnya di Kecamatan Batang Lubu Sutam (Desa Tamiang).

Dalam penelitian ini untuk Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, (3) Adaptasi.

Pada konteks ini, masyarakat harus diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek dalam penanggulangan pra bencana banjir, sehingga mereka mengetahui ancaman di wilayahnya dan mampu meningkatkan kapasitas menghadapi ancaman melalui kebijakan pra bencana banjir, sehingga mereka mengetahui ancaman di wilayahnya dan mampu meningkatkan kapasitas menghadapi ancaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka harus diakui dengan dibentuknya BPBD tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan dengan semestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan program-program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah maupun BPBD sendiri, serta untuk mengetahui tindakan apa saja yang selanjutnya diperlukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, gambar, dokumen pribadi, catatan di lapangan, serta foto, kemudian diamati secara mendalam.

Penelitian ini dianggap lebih relevan jika menggunakan tipe penelitian deskriptif yakni menggambarkan atau melukiskan berbagai macam hal yang berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena permasalahan diteliti terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas. Alasan selanjutnya karena Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas dekat dengan domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

Data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data diantaranya: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan di atas maka sumber data dalam penelitian ini sangat penting. Karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder (Purhantara, 2010:79).

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Guna mendukung penggunaan teknik non-probability sampling, peneliti akan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling berarti pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017, 219), misalnya informan yang ditunjuk adalah yang benar-benar mengerti tentang penanganan banjir di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian kualitatif informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang

sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu perlu ditentukan informan penelitian yang dapat memberikan informasi.

- a) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- b) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- c) Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- d) Sekretaris Desa Tamiang/Masyarakat;
- e) Humas Pesantren Nizhomul Hikmah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas terbentuk berdasarkan penjabaran dari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang mengurangi dampak/ resiko dari bencana.

Adapun visi BPBD Kabupaten Padang Lawas tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah Mewujudkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana. Untuk mencapai visinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas mempunyai misi yaitu sebagai berikut:

- 1) Melindungi daerah dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyentuh

Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin diadakannya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko, ancaman, dan dampak bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD bertanggung jawab penuh kepada Gubernur.

Kecamatan Batang Lubu Sutam Merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 12383 jiwa pada tahun 2020 dan terbagi dalam 28 wilayah desa.

Tabel 1. Nama-Nama Desa di Kecamatan Batang Lubu Sutam

No	Desa	Kode Pos	Kode Wilayah
1	Tanjung Botung Pinarik	22742	1221092019
2	Tanjung Baru	22742	1221092001
3	Tanjung Berani	22742	1221092003
4	Tangga Batu	22742	1221092015
5	Tandalan (Tandalon)	22742	1221092014
6	Tamiang	22742	1221092002
7	Siojo	22742	1221092009
8	Sibodak Papaso	22742	1221092025
9	Siadam	22742	1221092008
10	Salambue	22742	1221092022
11	Rombayan	22742	1221092021
12	Pinarik	22742	1221092020
13	Papaso	22742	1221092023
14	Pagaran Tayas	22742	1221092005
15	Pagaran Manggis	22742	1221092010
16	Pagaran Dolok Pinarik	22742	1221092016
17	Pagaran Beringin/Baringin	22742	1221092026
18	Muara Tige	22742	1221092024
19	Muara Malinto Lama	22742	1221092011
20	Muara Malinto Baru	22742	1221092017
21	Manggis	22742	1221092004
22	Hutabaru	22742	1221092012
23	Huta Nopan	22742	1221092013
24	Hatongga	22742	1221092006
25	Gunung Manaon	22742	1221092028
26	Gunung Inten	22742	1221092027
27	Botung	22742	1221092007
28	Aek Sorik	22742	1221092018

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas 2022

Dari tabel diatas peneliti bisa menjabarkan bahwasannya di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 28 desa, tetapi yang paling sangat terdampak apabila bencana banjir datang adalah salah Desa Tamiang. Desa Tamiang dikelilingi oleh aliran sungai sutam sehingga menyebabkan Desa Tamiang sangat rentan terhadap bencana banjir. Dengan rentannya Desa Tamiang terhadap yang namanya banjir perlu adanya pengarahan dan pedoman terhadap upaya penanggulangan

bencana banjir baik itu pencegahan, mitigasi, dan peringatan dini.

Penanggulangan Pra Bencana merupakan sebuah upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana baik itu yang berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan pra bencana banjir artinya sebelum terjadi bencana banjir tersebut, tahapan pra bencana merupakan suatu proses penting yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terhadap risiko bencana banjir secara maksimal. Dengan perencanaan yang telah dipersiapkan, diharapkan akan dapat mengurangi dampak kerugian besar yang terjadi pada masyarakat.

Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk:

- a) Pencegahan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau meminimalisir ancaman bencana yang akan terjadi. Penanggulangan bencana banjir dalam tahapan pencegahan sangat-sangat perlu diperhatikan agar bisa mengurangi atau menghilangkan sebab terjadinya bencana banjir, sehingga masyarakat tidak mendapatkan efek yang besar dari bencana banjir. Untuk mengurangi bencana banjir perlu adanya suatu persiapan, salah satu yang harus dibuat adalah membuat program Destana di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas khususnya di Desa Tamiang, karena Desa Tamiang sangat rentan yang namanya terhadap bencana banjir tersebut. Program Destana memang sudah berjalan di Kabupaten Padang Lawas tetapi bukan mencakup semua kecamatan, melainkan hanya di Kecamatan Barumon. Dalam pelaksanaan program tersebut menurut peneliti tidak berjalan sesuai dengan kondisi lingkungan yang terjadi, karena yang paling rentan yang namanya terhadap bencana banjir adalah Kecamatan Batang Lubu Sutam. Seharusnya program Destana tersebut yang paling utama di laksanakan adalah di Kecamatan Batang Lubu Sutam khususnya di Desa Tamiang, karena titik yang paling rentan yang namanya bencana banjir adalah Kecamatan Batang Lubu Sutam khususnya Desa Tamiang.
- b) Mitigasi merupakan suatu upaya untuk meminimalisir dari risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik dalam mengurangi bencana banjir maupun

penyadaran terhadap masyarakat dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana banjir khususnya dalam pra bencana banjir bagi masyarakat. Dalam konteks mitigasi bencana banjir memang sangat penting dilakukan karena dapat mengurangi bencana banjir tersebut sehingga masyarakat tidak begitu terdampak dengan adanya bencana. Tetapi berbeda dengan yang dilihat oleh peneliti bahwasannya dalam mitigasi penanggulangan pra bencana banjir tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2016, karena dalam hal mitigasi sebelum terjadinya bencana banjir belum ada sama sekali pengurangan risiko bencana tetapi setelah terjadinya bencana banjir (BPBD) dan Pemerintah setempat membuat suatu Bronjong di Desa Tamiang. Dalam kasus tersebut (BPBD) dan Pemerintah setempat kurang efektif menjalankan suatu kebijakan tersebut. Seharusnya Pemerintah setempat membuat mitigasi bersama dengan (BPBD) sebelum terjadinya musibah banjir. Mitigasi dibuat untuk meminimalisir risiko suatu bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana khususnya di Desa Tamiang. Mengurangi bencana tidak bisa dilaksanakan secara terburu-buru melainkan harus dengan persiapan yang harus dilakukan jauh sebelum bencana banjir itu datang melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan khusus. Salah satu yang bisa dilakukan adalah persiapan yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dengan handal dan memang matang untuk melakukan tugas penanggulangan pra bencana banjir. Mengurangi bencana bisa dirumuskan secara berkelanjutan, dijalankan, dievakuasi dan dinilai. Hal yang menyebabkan perumusan ulang dalam kebijakan salah satunya adalah faktor proses kebijakan evaluatif yang mempertimbangkan aspek mitigasi.

Kesiapsiagaan merupakan suatu kegiatan yang dibuat untuk menghadapi bencana melalui pengorganisasian serta melalui cara yang tepat guna sehingga akan tepat pada sasarannya. Kesiapsiagaan masuk juga dalam manajemen darurat kebencanaan, namun letaknya di pra bencana khususnya dalam masalah banjir. Dalam tahap ini terdapat pemberitahuan dini yaitu serangkaian kegiatan

pemberian informasi-informasi kepada masyarakat dalam menghadapi adanya bencana banjir yang akan terjadi. Dalam proses ini sangat bergantung tentang pemberitahuan yang akurat yang dibuat oleh pemerintah setempat kepada masyarakat. Sistem peringatan dini bencana banjir yang ada di Kabupaten Padang Lawas harus diperkuat. Dengan Perkuatan yang telah dibuat agar peringatan dini bencana dapat diarahkan pada luasan area yang terkena dampak banjir sehingga informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat bisa membantu masyarakat dalam hal pembeberian sosialisasi dan himbuan di tingkat masyarakat.

Untuk melihat menilai efektivitasnya peneliti menggunakan teori dari Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, (3) Adaptasi.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ini merupakan upaya-upaya ataupun proses-proses yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Lembaga terkait dalam menghadapi Bencana. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana dengan adanya upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka suatu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana.

Setelah peneliti membaca dan menelaah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2016, peneliti memang memahami tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 di Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk peraturannya, memang bisa peneliti katakan sangat bagus, apabila dilaksanakan sesuai dengan Perda tentu akan sangat meminimalisir resiko bencana di Kabupaten Padang Lawas.

Sebaliknya yang peneliti lihat dalam pelaksanaan Perda itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda Kabupaten Padang Lawas. Tujuan dari perda Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai yang masyarakat harapkan sehingga tujuan dari penanggulangan pra bencana bisa dikatakan masyarakat tidak berjalan karena masyarakat merasa tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam pra bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya dalam pencapaian tujuan/perencanaan tidak sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Karena upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya dalam sebuah perencanaan mitigasi bencana banjir agar pencapaian tujuannya bisa berjalan dengan efektif.

Gambar 1. Pembuatan Bronjong untuk Mitigasi Bencana Banjir



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2022

Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target dari hasil. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Tamiang bahwasannya masyarakat sangat kecewa dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas karena tidak ada pencegahan, mitigasi yang dilakukan. Peneliti juga melihat dilapangan tidak ada mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas memang sekarang sudah ada pembangunan bronjong di Desa Tamiang tetapi setelah terjadi banjir baru ada pembangunan, sehingga masyarakat kecewa dengan Pemerintah Daerah.

Integrasi

Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam proses partisipasi masyarakat adalah bagian penting termasuk juga proses sosialisasi dalam setiap program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas yang tujuannya agar masyarakat yang berada di Kabupaten Padang Lawas khususnya Kecamatan Batang Lubu Sutam mengetahui apa yang disosialisasikan khususnya itu pencegahan, mitigasi dan peringatan dini.

Tetapi peneliti menyimpulkan bahwasannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas kurang efektif dalam melakukan sosialisasi karena tidak terjun kelapangan/kemasyarakat (Desa-Desa). Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan mitigasi bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir.

Sementara itu untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang potensi di wilayahnya. Agar penyelenggaraan sistem peringatan dini lebih menyeluruh, pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus mendukung upaya pembangunan sistem peringatan dini untuk bencana bencana prioritas diseluruh wilayah desa. Dengan adanya sistem peringatan dini, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana. Selain itu, masyarakat juga mengetahui tanda-tanda yang digunakan oleh pemerintah untuk memerintah masyarakat untuk melakukan evakuasi secara jelas dan terarah.

Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di

lapangan serta sumber daya manusia, sekumpulan orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan mereka akan menghadapi situasi lingkungan akan berubah-ubah setiap saat. Adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan bertujuan untuk membantu Indonesia khususnya Kabupaten Padang Lawas dalam mengelola risiko bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan garda terdepan dalam melakukan penanggulangan bencana dalam kemampuannya dalam menghadapi bencana banjir.

PENUTUP

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana masih jauh dari kata optimal. Penanggulangan bencana merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas peneliti dapat simpulkan:

Pencapaian Tujuan: Pada aspek pencapaian tujuan pra bencana bencana banjir di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas ini sendiri tidak menyentuh langsung kepada masyarakat khususnya di Desa Tamiang. Karena dalam tahapan penanggulangan pra bencana tidak ada penanggulangan pra bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat dalam hal mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan tetapi penanggulangan pra bencana banjir dilaksanakan untuk kecamatan yang lain yang tidak begitu rentan terhadap namanya bencana banjir.

Integrasi: Pemerintah Kabupaten Padang Lawas/Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Padang Lawas tidak melakukan sosialisasi sebelum terjadinya banjir (pra bencana banjir) tetapi setelah terjadinya banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Padang Lawas dan Instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Adaptasi: Badan Penanggulangan Bencana Dearah kurang menyesuaikan diri kepada masyarakat sehingga program dari pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas hanya membuat masyarakat sebagai *objek* bukan ikut serta sebagai *subjek*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Edisi Kedua), Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Eyestone, Robert. The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merril. 1971.
- Friedrich Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork: Mc Graw-Hill.
- Guba, Egon G. Yvonna S. Lincoln. 1981. Efective Evalution. San Fransisco: Jossey-Bass Publisers.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offeset, Bandung.
- Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara, Serikat Perusahaan Pers, 2018. <http://www.spsindonesia.org/>
- Robbins Stephen P, 2018. Teori Organisasi Struktur, Desain dan Apikasi. (Edisi Ketiga), Jakarta: Arcan.
- Steers, Richard. M. (2005). Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukamto. (2015). Manajemen Antisipasi Bencana. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tangkilsan, Hesel N. S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi.2017
- Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir.Bandung:Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi.
- Ariansyah sir, Toga, 2022."Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas".Medan:USU
- Isngadi, dan Khakim,m.2021. Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Fikih Kebencanaan Terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19). Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 7 Nomor 1, Februari 2021. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Jaya, R, P.Qadarsih, A, M. Pernanda, H. (2021). Efektivitas Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci Dalam Penanggulangan Bencana Dikabupaten Kerinci. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha). Volume 3 No. 7-31.
- Mahardikal, B. Kurniansyah, D. Adiarsa, S, R.(2022).Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Banjir di Desa Winajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Vol. 8, No.2, Februari 2022.
- Marfuah, Cempaka, S, Ardiansyah, A. R., Rahmawati, L., Rediana, M. Y., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 35-45.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.